

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh (Mardhotillah et.al, 2024) yang berjudul Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Membantu Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang). Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek lain seperti sosial, ekonomi, dan keuangan. Untuk meredam dampak negatif tersebut, pemerintah memperkenalkan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu. Namun, sejak peluncurannya pada tahun 2020, program ini belum pernah dievaluasi. Penelitian yang dilakukan di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang bertujuan untuk mengkaji efektivitas program tersebut dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin. Penelitian menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) dengan analisis berdasarkan Logical Framework Analysis. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut belum berjalan optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin di Desa Citali. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, jumlah bantuan yang kurang mencukupi, dan minimnya partisipasi masyarakat miskin dalam program desa. Untuk mengatasi permasalahan ini, direkomendasikan adanya program seperti bimbingan teknis terkait tata kelola bantuan, penyesuaian nominal bantuan, pembinaan dalam penggunaan dan pengawasan bantuan, serta peningkatan sosialisasi dari pihak pemerintah desa sebelum pelaksanaan program.

Penelitian kedua oleh (Ida, 2021) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mahe Pasar, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, yang penting dilakukan untuk memahami sejauh mana program tersebut dijalankan dan dampaknya di masyarakat. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif analitik, yang bertujuan mengungkap kondisi nyata berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi dan kuesioner. Dengan melibatkan 63 responden yang mewakili populasi, analisis dilakukan menggunakan teknik persentase. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT di Desa Mahe Pasar dinilai berdasarkan tiga aspek utama: manfaat, ketepatan, dan kelayakan. Dari hasil analisis, program tersebut memperoleh skor 68,89%, yang setelah dibulatkan menjadi 69%, masuk dalam kategori "Dilaksanakan."

Penelitian ketiga oleh (Indriani, Irianto, & Ratnawati, 2023) yang berjudul Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Sedatigede Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerimaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Desa Sedatigede, Sidoarjo. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengandalkan data utama yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menekankan pentingnya evaluasi penerimaan BLT agar proses penyalurannya berjalan lancar setiap bulan dan bebas dari hambatan. Meski begitu, dampak BLT terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sedatigede masih terbatas, karena dana tidak selalu dicairkan secara konsisten setiap bulan, dan jumlahnya relatif kecil, sehingga belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu di desa tersebut.

Penelitian keempat oleh (Nabila Brilianti Putri, 2023) yang berjudul Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-

DD) Tahun 2020-2022 di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) periode 2020-2022 di Desa Toapaya Selatan, Kabupaten Bintan. Desa ini merupakan salah satu penerima BLT-DD yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi, terutama mereka yang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam penelitian ini, kebijakan BLT-DD dievaluasi menggunakan indikator dari William N. Dunn, seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis sejauh mana BLT-DD mencapai tujuannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BLT-DD di Desa Toapaya Selatan telah efektif dalam membantu masyarakat menghadapi krisis ekonomi selama pandemi. Namun, meski bantuan tersebut bermanfaat, jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan, dan distribusinya belum merata, karena masih ada warga miskin yang belum menerima bantuan. Selain itu, ada beberapa penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, menunjukkan masih adanya ketidakakuratan dalam penyaluran BLT-DD.

Penelitian kelima oleh (Saputra, 2022) yang berjudul Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Studi Pada Pulo Tegalsari RW 07 RT 10 Kota Surabaya. Pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia, ditambah dengan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menyebabkan dampak signifikan pada perekonomian masyarakat. Sebagai langkah tanggap, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020, yang bertujuan menjaga stabilitas keuangan negara dan sistem keuangan di tengah pandemi. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak COVID-19 di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Selain itu, Menteri Sosial menerbitkan Keputusan No. 54/HUK/2020 terkait pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan

bantuan sosial sembako untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan BLT di Pulo Tegalsari, Kota Surabaya, dengan menggunakan teori evaluasi dari William N. Dunn. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada dampak positif dari kebijakan BLT, tidak semua indikator sesuai dengan harapan pemerintah. Beberapa aspek, seperti pemerataan dan ketepatan sasaran, masih memerlukan perbaikan.

Penelitian keenam oleh (Fazriah, Suparman, & Miharja, 2022) yang berjudul Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Desa Batujaya Kabupaten Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) di Desa Batujaya. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengadopsi model evaluasi program Stufflebeam yang mencakup berbagai aspek seperti konteks, input, proses, dan produk. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Proses analisis dilakukan dengan mengurangi data, menyajikan informasi, dan menarik kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Batujaya yang terdampak oleh COVID-19 dan telah diimplementasikan dengan baik. Namun, terdapat kendala dalam pengumpulan data calon penerima manfaat, terutama dalam menentukan siapa yang benar-benar memenuhi kriteria yang ada, serta data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak selalu akurat. Keterbatasan dana desa dalam distribusi BLT, yang hanya mencapai sekitar 40% dari total dana, juga mengakibatkan ketidakmerataan dalam bantuan. Meski demikian, program ini tetap memberikan dampak positif bagi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pembaruan data DTKS secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Penelitian ketujuh oleh (Jeprianus et.al, 2023) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Rasau Jaya Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Rasau Jaya Umum, mulai dari proses rekrutmen hingga penyaluran bantuan. Mengacu pada teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn dalam tulisan Syahriza Rizani, F. (2023), penelitian ini menggunakan model evaluasi yang mempertimbangkan berbagai fakta baik dari masa kini maupun masa lalu untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan berdasarkan enam kriteria: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus pada penjelasan dan pemahaman fenomena yang ada. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Desa Rasau Jaya Umum merupakan satu-satunya desa yang mengimplementasikan sistem penyaluran dana BLT-DD menggunakan Cash Management System (CMS), yang memungkinkan pengelolaan keuangan secara langsung melalui platform online bagi nasabah non-ritel. Inovasi ini menjadikan desa tersebut sebagai percontohan pertama di Indonesia dalam penerapan CMS untuk penyaluran dana. Penelitian ini difokuskan pada masyarakat yang memiliki banyak anak, mengalami masalah stunting, lansia, serta individu yang menderita penyakit jangka panjang, sehingga kehilangan mata pencaharian dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Penelitian kedelapan oleh (Mistia, 2022) yang berjudul Evaluasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Masyarakat Miskin di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Penelitian ini berfokus pada evaluasi penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, pada masa pandemi COVID-19.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana pelaksanaan Program BLT di Kelurahan Tanah Enam Ratus serta dampaknya terhadap pendapatan masyarakat setempat. Tujuan utama dari penelitian adalah untuk menganalisis evaluasi yang dialami oleh keluarga penerima BLT di wilayah tersebut selama pandemi, serta untuk menilai efek program BLT terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus pada para penerima dana BLT dari tahap 12 dan 13, yang berjumlah 524 Rumah Tangga Sasaran. Teknik pemilihan sampel yang diterapkan adalah purposive sampling dan snowball sampling, sehingga diperoleh 20 Rumah Tangga Miskin yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap sebagai sampel penelitian. Penelitian ini termasuk dalam kategori non-probability sampling, di mana setiap individu dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sebagai saran, peneliti merekomendasikan agar dilakukan pembaruan data terhadap masyarakat miskin untuk penentuan penerima BLT, serta pentingnya penerapan kriteria yang tepat dalam penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Penelitian kesembilan oleh (Maryam & Cahyani, 2022) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo. Penelitian ini berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Pulung Rejo.” Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana proses pelaksanaan program BLT-DD, mulai dari rekrutmen hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan yang relevan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan dengan pendekatan Miles dan Huberman. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada teori implementasi kebijakan publik

yang diajukan oleh Merilee S. Grindle, yang memandang implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif. Grindle berpendapat bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik dapat dinilai berdasarkan pencapaian hasil yang diinginkan. Dalam pelaksanaan Program BLT-DD, para pelaksana menghadapi beberapa kendala, seperti (1) ketidakcocokan antara kriteria penerima bantuan dan kondisi nyata masyarakat Desa Pulung Rejo, serta (2) penggunaan data yang telah terverifikasi yang sudah kadaluarsa. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa sebagai pelaksana program BLT-DD mengambil langkah-langkah dengan (1) menerbitkan Peraturan Desa (PerKades) yang menetapkan kriteria penerima bantuan, dan (2) memperbarui data ganda hasil verifikasi pusat untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Penelitian kesepuluh oleh (Sitorus et.al, 2024) yang berjudul Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana (BLT) Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Berdagai. Dana desa merupakan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan untuk mendukung pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat. Sejak awal tahun 2020, masuknya COVID-19 ke Indonesia berdampak signifikan terhadap perekonomian, baik di tingkat nasional maupun di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan warga dari golongan ekonomi menengah ke bawah mengalami kesulitan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks ini, bantuan dari pemerintah menjadi sangat penting untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi, dengan lokasi di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pengajahan, Kabupaten Deli Serdang. Fokus penelitian ini adalah evaluasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Namun, berdasarkan hasil evaluasi, penyaluran bantuan tersebut belum

sepenuhnya tepat sasaran, karena masih ada masyarakat yang dianggap mampu namun tetap menerima bantuan tersebut.

B. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Menurut Carl Friedrich, seperti yang dikutip oleh (Agustina & Hendra, 2021), kebijakan publik adalah tindakan yang direncanakan atau diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu. Lingkungan ini dapat menciptakan hambatan maupun peluang bagi kebijakan yang diusulkan, dengan tujuan memberikan solusi untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, proses kebijakan publik terdiri dari tiga tahap: formulasi atau penyusunan kebijakan, implementasi atau pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi atau penilaian kebijakan (Agustina & Hendra, 2021). Menurut Anderson, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam menangani masalah atau isu penting yang perlu diperhatikan (Maryam & Cahyani, 2022).

Kebijakan direalisasikan melalui rangkaian program yang kemudian diimplementasikan sebagai proyek-proyek konkret, dan akhirnya bertransformasi menjadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan peran aktif pemerintah, masyarakat, atau kolaborasi antara keduanya. Implementasi kebijakan di lapangan sangat penting untuk menilai keselarasan serta relevansi model yang telah dirancang secara teoretis (Sasuwuk, Lengkong, & Palar, 2021). Pada tahap implementasi ini, dapat diukur “kesesuaian” dari berbagai faktor penentu keberhasilan kebijakan atau program. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini bergantung pada tiga faktor kunci: 1) Kesesuaian program dengan kebutuhan penerima manfaat, yaitu sejauh mana program tersebut menjawab kebutuhan kelompok sasaran. 2) Kesesuaian program dengan kapasitas organisasi pelaksana, yakni

kemampuan organisasi untuk menjalankan tugas yang diperlukan oleh program. 3) Kesesuaian antara persyaratan organisasi dan kemampuan kelompok sasaran untuk mencapai tujuan program (Makmur & Rifdan, 2022). Implementasi kebijakan publik mencakup tiga aktivitas utama, yakni: Pertama, pengorganisasian, yaitu penataan ulang unit-unit atau model agar kebijakan dapat menghasilkan outcome sesuai dengan sasaran. Kedua, interpretasi, yang berarti menyampaikan substansi kebijakan dalam bahasa yang mudah dipahami dan operasional, sehingga dapat diterima dan dijalankan oleh pelaksana dan sasaran kebijakan. Ketiga, aplikasi, yaitu penyediaan sarana secara rutin, baik dalam bentuk pembayaran atau fasilitas lain, guna mendukung tercapainya tujuan kebijakan (Lestari et al., 2024).

2. Evaluasi Program

Evaluasi pada dasarnya dapat dipahami sebagai proses penaksiran, pemberian nilai, dan penilaian yang bertujuan untuk menganalisis hasil dari suatu kebijakan. Inti dari evaluasi ini adalah menghasilkan informasi yang bersifat evaluatif. Menurut William Dunn, evaluasi kebijakan berfokus pada pengumpulan informasi mengenai nilai atau manfaat dari kebijakan yang telah diterapkan (Maryam & Cahyani, 2022). Sementara itu, Lester dan Stewart menekankan bahwa evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian kebijakan yang gagal serta menentukan apakah kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan mampu memberikan dampak yang diharapkan (Ida, 2021).

Karding dalam (Maryam & Cahyani, 2022) mendefinisikan program sebagai serangkaian kegiatan yang merupakan bentuk pelaksanaan dari kebijakan dan berlangsung secara berkelanjutan dalam suatu organisasi yang melibatkan sejumlah individu. Muhaimin dan Prabowo dalam (Ida, 2021) menjelaskan bahwa program merupakan sebuah pernyataan yang mengintegrasikan berbagai harapan atau tujuan yang saling terkait, dengan fokus

untuk mencapai sasaran yang sama. Biasanya, program ini mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah satu unit administrasi atau yang saling melengkapi, yang perlu dilaksanakan baik secara bersamaan maupun berurutan. Mudasir dalam (Ida, 2021) juga menambahkan bahwa program sering kali terkait erat dengan proses perencanaan, persiapan, serta desain atau rancangan yang diperlukan.

Sementara itu, menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin dalam (Maryam & Cahyani, 2022), evaluasi program adalah proses sistematis untuk menilai nilai, tujuan, efektivitas, atau kesesuaian suatu program berdasarkan kriteria dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Keputusan evaluasi dibuat dengan hati-hati melalui perbandingan data observasi dengan standar yang telah ditetapkan.

Evaluasi program dapat dipahami sebagai proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis dan ilmiah. Hasil dari evaluasi ini sangat berharga bagi pengambil keputusan untuk menentukan pilihan kebijakan program yang lebih baik di masa mendatang. Keberhasilan evaluasi ini tergantung pada dua konsep kunci, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas berkaitan dengan seberapa baik output yang dihasilkan dibandingkan dengan input yang digunakan, sedangkan efisiensi menggambarkan seberapa optimal input dimanfaatkan untuk mencapai output yang diinginkan melalui proses tertentu (Sitorus et al., 2024).

Sinambela dalam (Ida, 2021) menyatakan bahwa untuk dapat dianggap baik, sebuah program harus memenuhi beberapa kriteria penting, yaitu:

- a. Tujuan yang harus dirumuskan dengan jelas agar dapat dipahami.
- b. Pemilihan alat atau metode yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

- c. Terdapat kerangka kebijakan yang konsisten atau proyek yang saling berhubungan untuk memastikan efektivitas dalam mencapai tujuan program.
- d. Pengukuran biaya yang diperkirakan serta manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan program.
- e. Keterkaitan dengan kegiatan lain dalam upaya pembangunan, mengingat bahwa program tidak dapat berjalan sendiri.
- f. Berbagai usaha dalam manajemen, termasuk pengadaan sumber daya manusia, pembiayaan, dan aspek lainnya untuk melaksanakan program secara efektif.

Menurut Maryam & Cahyani (2022) evaluasi memiliki dua fungsi utama yang penting. Pertama, evaluasi berperan dalam menyediakan informasi yang tepat dan terpercaya mengenai kinerja suatu kebijakan, yang mencakup sejauh mana kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah tercapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi juga membantu dalam menjelaskan dan memberikan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

William N. Dunn (Maryam & Cahyani, 2022) mengemukakan sejumlah kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu kebijakan, yang meliputi:

1). Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan seberapa sukses program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Ini menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah tujuan dari program tersebut tercapai dengan baik.

2). Efisiensi

Efisiensi mengacu pada kemampuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan biaya dan waktu yang diperlukan. Dengan menciptakan efisiensi, diharapkan sumber

daya dapat digunakan secara optimal, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas dalam pelayanan yang diberikan.

3). Kecukupan

Kecukupan berhubungan erat dengan seberapa efektif suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat diukur dari hasil pencapaian program dalam mengatasi isu-isu yang dihadapi. Kriteria ini juga menekankan pentingnya hubungan antara kebijakan yang ada dan hasil yang diharapkan, sehingga dapat dilihat sejauh mana solusi yang ditawarkan dapat mengatasi permasalahan yang muncul.

4). Perataan

Kriteria perataan mengedepankan pentingnya keadilan dalam penerapan kebijakan publik di semua lapisan masyarakat. Meskipun perataan sering dihubungkan dengan prinsip keadilan, dalam konteks evaluasi kebijakan, hal ini juga mencakup sejauh mana dampak dari program tersebut tersebar secara merata di antara semua kelompok masyarakat.

5). Responsivitas

Responsivitas berfokus pada seberapa baik suatu kebijakan dapat menjawab kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tertentu di masyarakat. Hal ini penting untuk menilai seberapa cepat kebijakan dapat beradaptasi dan memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat.

6). Ketepatan

Ketepatan mengacu pada seberapa efektif suatu kebijakan publik dapat menyelesaikan masalah yang ada. Penilaian ketepatan dilakukan dengan mengkaji apakah tujuan yang ditetapkan relevan dengan kelompok sasaran dan apakah kebijakan tersebut mampu memberikan dampak yang sesuai dengan harapan. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ditentukan oleh seberapa baik proses pencapaian tersebut dilaksanakan.

Menurut Ida (2021) menyatakan bahwa terdapat tiga aspek utama yang digunakan sebagai standar dalam mengevaluasi suatu kegiatan:

a. *Utility* (Manfaat)

Hasil dari evaluasi harus memberikan keuntungan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan mengenai program yang sedang dijalankan. Dalam hal Bantuan Langsung Tunai (BLT), evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya. Diharapkan oleh pemerintah, BLT dapat membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin yang terdampak oleh pandemi COVID-19 di Indonesia.

b. *Accuracy* (Akurasi)

Data yang diperoleh dari evaluasi harus akurat dan tepat. Dalam konteks BLT, penting untuk memastikan bahwa data mengenai penerima bantuan adalah valid. Ketidakakuratan informasi ini dapat menyebabkan konflik, terutama jika ada masyarakat yang merasa berhak untuk menerima bantuan tetapi tidak terdaftar.

c. *Feasibility* (Kelayakan)

Proses evaluasi yang direncanakan seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam konteks BLT, hasil evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan yang diberikan dan daftar penerimanya layak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta melalui pengamatan langsung untuk memastikan keakuratan data yang dikumpulkan oleh petugas pendataan.

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah yang memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai atau berbagai jenis dukungan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tidak bersyarat (unconditional cash transfer), untuk membantu masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin. Brasil menjadi negara pionir dalam pelaksanaan program BLT ini, diikuti oleh banyak negara lainnya. Besaran dana yang dialokasikan dan cara pelaksanaan program BLT ini bervariasi, tergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah (Maryam & Cahyani, 2022).

Bantuan Langsung Tunai adalah program kompensasi jangka pendek yang ditujukan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga sasaran, termasuk rumah tangga yang sangat miskin, miskin, dan hampir miskin (near poor). Meskipun program BLT bukanlah solusi utama untuk mengatasi masalah kemiskinan, diharapkan program ini dapat membantu dalam upaya penanggulangan kemiskinan, terutama saat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat, sehingga dapat mencapai keseimbangan baru (Putri, 2023). Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai tujuan dan alasan tertentu. Program ini merupakan refleksi dari tindakan pemerintah yang mengandung nilai-nilai tertentu, dengan fokus pada penyelesaian masalah publik, terutama masalah kemiskinan, melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia (Ningsih, 2022).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dirancang sebagai respon pemerintah terhadap peningkatan harga bahan pokok dan BBM, yang ditujukan untuk mendukung rumah tangga miskin. Dalam skema ini, setiap penerima akan mendapatkan subsidi sebesar Rp100.000 per bulan selama tiga bulan. Penentuan

penerima program ini didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan distribusinya dilakukan melalui PT. POS Indonesia yang telah ditunjuk untuk mengelola proses penyaluran. Menurut Ningsih (2022) untuk dapat menerima BLT, warga harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- 1). Tinggal di rumah yang memiliki lantai tanah.
- 2). Tidak memiliki fasilitas toilet yang memadai.
- 3). Dinding rumah terbuat dari papan, kayu murah, rumbia, atau tembok yang belum diplester.
- 4). Belum terhubung dengan jaringan listrik.
- 5). Memperoleh air minum dari sumur atau sumber yang tidak terlindungi.
- 6). Menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk kegiatan memasak sehari-hari.
- 7). Hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam sekali dalam seminggu.
- 8). Mampu makan hanya satu atau dua kali dalam sehari.
- 9). Hanya bisa membeli pakaian satu kali dalam setahun.
- 10). Tidak mampu membayar biaya pengobatan di puskesmas atau klinik.
- 11). Pendapatan kepala keluarga kurang dari Rp500.000 per bulan.
- 12). Pendidikan tertinggi kepala keluarga hanya setara SD atau tidak pernah bersekolah.
- 13). Tidak memiliki barang berharga yang mudah untuk dijual.
- 14). Tidak memiliki sepeda motor untuk transportasi pribadi.